
ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SORONG

ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE USING THE VALUE FOR MONEY APPROACH AT THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OFFICE OF SORONG CITY

Fanny Jitmau¹, Pitter Leiwakabessy², Erna Kurniawati³, Irene Iva Basna⁴

^{1,2,3,4}Politeknik Saint Paul Sorong

¹fannyjitmau28@gmail.com, ²leiwakabessypitter@gmail.com, ³ernakurniawatih@gmail.com,

⁴nobasyeninar78597@gmail.com

Abstrak

Pemerintahan daerah bekerja menurut undang-undang yang berlaku dalam UU No.23 Tahun 2014. Pemerintah daerah sangat memiliki peran penting dalam mengelolah daerah menuju pembangunan dan pertumbuhan yang sesuai dengan prinsip yang ada didalam suatu daerah. Kota Sorong merupakan satu-satunya kota yang ada didalam Papua Barat Daya. Kota sorong Provinsi Papua Barat Daya tentunya memiliki tujuan dan keinginan untuk dicapai sehingga dapat mengembangkan kota sorong dengan penuh baik. Pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam mencatat dan mendata masyarakat yaitu dinas catatan sipil. Dinas pencatatan sipil merupakan salah satu dinas yang memiliki peran penting dalam melayani masyarakat dalam hal membuat akte kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, kartu tanda penduduk dan juga membuat kartu keluarga. Kinerja keuangan merupakan salah satu hal penting untuk diterapkan dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintah, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah di tuntun untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah dengan secara baik. Dalam melaksanakan program kerjanya serta menyediakan layanan publik yang berkualitas di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil) perlu memperhatikan hasil kerjanya, kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu isu yang mulai menjadi sorotan di kalangan masyarakat yang sadar akan pentingnya penyelenggaraan administrasi publik yang baik.

Kata kunci : Disdukcapil, KTP-el, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Laporan Keuangan

Abstract

The purpose of this research is to analyze and describe the influence of accountability on village fund. The regional government works according to the applicable laws in Law No. 23 of 2014. The regional government has a very important role in managing the region towards development and growth in accordance with the principles in a region. Sorong City is the only city in Southwest Papua. Sorong City, Southwest Papua Province certainly has goals and desires to achieve so that it can develop Sorong City properly. The government that has the responsibility to record and

register the community is the civil registration service. The civil registration service is one of the services that has an important role in serving the community in terms of making birth certificates, deaths, marriages, divorces, identity cards and also making family cards. Financial performance is one of the important things to be implemented in public sector organizations including the government, since the implementation of performance-based budgeting, all governments are guided to be able to produce good government financial performance. In implementing its work program and providing quality public services in the population and civil registration service (disdukcapil) it is necessary to pay attention to its performance results, the performance of government agencies is one of the issues that is starting to be highlighted among the public who are aware of the importance of good public administration.

Keywords: Disdukcapil, e-KTP, Sorong City, Southwest Papua Province, Financial Report

1. PENDAHULUAN

Sorong adalah satu-satunya kota yang terletak di provinsi Papua Barat Daya. Sorong Provinsi Papua Barat Daya tentunya memiliki tujuan dan keinginan untuk dicapai sehingga dapat mengembangkan kota sorong dengan penuh baik. Penduduk yang ada didalam kota sorong bukan hanya masyarakat asli namun semua kalangan masyarakat dari berbagai daerah ada didalam kota sorong sehingga kota sorong ini menjadi padat penduduk. Sehingga setiap masyarakat harus terdata sesuai dengan keberadaan. Pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam mencatat dan mendata masyarakat yaitu dinas catatan sipil. Dinas pencatatan sipil ini salah satu lembaga yang memainkan peran penting dalam melayani masyarakat sehubungan dengan akta kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, identifikasi, dan. kartu tanda penduduk dan juga membuat kartu keluarga. Dalam konteks ini Dinas pencatatan sipil kota sorong bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pengembangan diarahkan pada penghuni dan keduanya terkait dan silang. pembangunan, baik yang bersifat sektoral dan lintas sektor agar dapat terarah dan terkait dengan penduduk guna untuk mencapai tujuan tersebut.

Dinas pencatatan sipil mencatat semua data pribadi masyarakat yang bisa dikatakan sebagai dokumen berharga atau milik pribadi. Meskipun kota sorong menetapkan kouta untuk beribu” masyarakat untuk wajib KTP namun yang terrealisasikan hanya beberapa saja, hasil dari Komunitas menunjukkan perbedaan antara harapan dan kenyataan di lapangan. Beberapa mengeluh tentang durasi layanan dan penundaan keterlambatan blangko, ini adalah aspek dari ketertiban umum untuk mencapainya efektivitasnya pemerintah yang unggul dalam pelayanan KTP. , dan penelitian ini berupa menghubungkannya dengan masalah-masalah yang terkait dengan tata kelola layanan pembuatan KTP untuk mengetahui jumlah penduduk yang sudah rencana dan realisasi dan mendapatkan hasil yang Ekonmi,Efisien dan Efektivitas.

Kinerja keuangan adalah salah satu hal penting yang harus digunakan oleh organisasi sektor publik termasuk pemerintah, karena telah disebabkan oleh generasi berbasis kinerja keuangan pemerintah yang tepat sejak Implementasi anggaran terkait kinerja. Dalam melaksanakan program kerjanya serta menyediakan layanan publik yang berkualitas di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil) perlu memperhatikan hasil kerjanya, Akuntabilitas publik berarti bagaimana pemerintah dapat dengan baik mengelola atau menggunakan sumber daya untuk kepentingan masyarakat, lalu melaporkan serta mengungkapkan seluruh aktifitas dan kegiatannya kepada publik selaku pemangku kepentingan..

2. DASAR TEORI / METODE PENELITIAN/PERANCANGAN

2.1 Kualitas Kinerja

Kualitas kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial, sistem pengukuran kinerja dapat dilakukan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward dan punishment sistem. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, hal ini akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Secara umum tujuan sistem kinerja adalah (Prof.Dr.Mardianso)

Secara umum tujuan sistem kinerja adalah (Prof.Dr.Mardianso)

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah dan
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif adalah suatu era yang mengidentifikasi keberhasilan kinerja pemerintah dengan kerja organisasi yang

referensinya manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan non finansial pada waktu tertentu.

2.2 Value for money (VFM)

(Mahmudi 2015) Pengukuran kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja yang mengukur ekonomi, efisien dan efektivitas suatu kegiatan atau program dan organisasi. Pengukuran kinerja Vfm merupakan bentuk pengukuran kinerja yang spesifik dan unik pada organisasi sektor publik. Karena pentingnya konsep tersebut. *Value For Money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik meskipun sama –sama menggunakan *value and money*, konsep *value for money* sangat berbeda dengan pengertiannya dengan konsep *time value for money* dalam akuntansi dan manajemen keuangan. *Time value for money* memiliki pengertian bahwa nilai uang bisa berupa dengan sejalannya waktu, sedangkan *value for money* memiliki pengertian bahwa penghargaan terhadap nilai uang. Berarti bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Konsep *value for money* memiliki Tiga elemen utama yaitu:

1. Ekonomi

Ekonomi terkait dengan pengkonversian input primer sumber daya keuangan (uang atau kas) menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasional organisasi, konsep ekonomi sangat berkaitan dengan konsep biaya untuk memperoleh unit input, ekonomi memiliki pengertian bahwa daya input hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah yang mendekati harga pasar, secara matematis .

2. Efisiensi

Jika ekonomi hanya berbicara mengenai input, yaitu bagaimana memperoleh input dengan biaya atau harga lebih rendah, maka efisiensi berbicara mengenai input dan output. Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut.

3. Efektivitas

Untuk efektivitas sendiri terkait dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas memiliki hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka akan semakin besar juga efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi hanya fokus kepada input dan efisien kepada output atau proses, maka efektivitas akan fokus kepada out.

4. Indikator Kinerja Dan Pengukuran Value For Money (VFM)

Value for money atau biasa disingkat VFM merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah, kinerja pemerintah tidak dapat di nilai dari sisi output dan outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cangkupan layanan. Permasalahan yang sering di hadapi oleh pemerintahan dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi berupa keluaran tidak berwujud. Istilah ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan istilah indikator kinerja, ukuran kinerja mengacu pada penelitian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya memerlukan indeksasi-indeksasi kinerja tersebut memerlukan hal-hal antara lain

1. Meliputi proses, prosedur dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah di jelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi, yang jelas didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta tanggung jawab
2. Spesifikasi dan standardisasi Adalah kinerja suatu kegiatan, program dan suatu organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi tersebut akan menjadi standar penelitian
3. Kopensi teknis dan profesionalisme Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standardisasi, maka diperlukan personel yang memiliki kopensi teknis dan profesional dalam bekerja.
4. Mekanisme ekonomi dan pasar Mekanisme ekonomi berkaitan dengan pemberian penghargaan dan hukuman yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya Vfm, ukuran kinerja digunakan untuk memberikan penghargaan dan hukuman
5. Mekanisme sumber daya manusia Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi pegawainya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi.

Permasalahan teknis yang dihadapi pada saat pengukuran ekonomi, efisien dan efektifitas (Value For Money) adalah organisasi yang bagaimana membandingkan input dan output.

3. PEMBAHASAN

Berikut ini adalah data Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP dan wajib KTP Menurut Distrik yang ada di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya

Table 3.1 Data KTP

No	Distrik	Penduduk wajib KTP		Sudah rekam KTP	
		2022	2023	2022	2023
1	Sorong	14.898	15.059	10.633	10.681
2	Sorong timur	26.998	29.564	20.040	22.052
3	Sorong Barat	28.498	28.885	16.010	16.063
4	Sorong kepulauan	9.502	9.862	5.271	5.503
5	Sorong Utara	26.862	28.013	16.524	17.280
6	Sorong Manoi	43.055	43.502	23.873	23.712
7	sorong Kota	16.645	16.737	10.764	10.615
8	Sorong Klawurang	10.627	11.422	7.057	7.707
9	Malaimusa	24.656	24.852	14.476	14.405
10	Maladumes	8.208	8.465	4.747	4.944
Total		209.949	216.361	129.395	132.962

Sumber Data : Disdukcapil

Dari data yang diperoleh di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Sorong diketahui untuk tahun 2022 yang sudah membuat KTP untuk Warga Kota Sorong sejumlah 129.395 Jiwa dan tahun 2023 Sejumlah 132.962 Jiwa dari tahun 2022 ke 2023 ada peningkatan sejumlah 3.567 Jiwa.

Tabel 3.2. Rencana Biaya-biaya Pembuatan KTP Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Keterangan	Tahun	
		2022	2023
1	Bahan baku KTP	146.964.300	151.452.700
2	Mesin KTP	1.500.000	
3	Tenaga kerja	33.422.400	33.422.400
4	Biaya Lain-lain	5.000.000	5.000.000
Total		186.868.700	189.875.100

Merujuk pada tabel, 3.2 Berikut adalah table biaya-biaya dan juga bahan baku yang di perlukan untuk pembuatan KTP pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Sorong.

Tabel 3.3. Realisasi Biaya-biaya Pembuatan KTP Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Keterangan	Tahun	
		2022	2023
1	Bahan baku KTP	90.576.500	93.073.400
2	Mesin KTP	1.500.000	
3	Tenaga kerja	33.422.400	33.422.400
4	Biaya Lain-lain	5.000.000	5.000.000
Total		130.498.900	131.495.800

Sumber : Olah data

Berikut ini adalah hasil realisasi biaya yang telah di lakukan, ini memiliki nilai yang sangatlah rendah, dibandingkan dari hasil perencanaan biaya yang di perlukan itu sangatlah besar. Dari hasil Olah data maka diketahui bahwa biaya –biaya untuk pembuatan KTP tahun 2022 totalnya adalah Rp. 130.498.900,- dan untuk tahun 2023 sejumlah Rp131.495.800,-Adapun untuk biaya bahan baku per KTP Rp. 700,- untuk mesin KTP karena penulis mengambil data pada Disdukcapil tahun 2024 dan data yang diberikan tahun 2022 dan 2023, untuk biaya mesin pembuatan KTP penulis tempatkan ditahun 2022, untuk tenaga kerja yang bekerja ada 2 tenaga kerja dengan gaji per orang Rp. 2.785.200 Per bulan untuk 1 Tahun dan ada pengeluaran untuk biaya tak terduga sejumlah Rp.5.000.000,-

Tabel 3.4. Realisasi Biaya-biaya Pembuatan KTP Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Keterangan	Tahun	
		2022	2023
1	Bahan baku KTP	90.576.500	93.073.400
2	Mesin KTP	1.500.000	
3	Tenaga kerja	33.422.400	33.422.400
4	Biaya Lain-lain	5.000.000	5.000.000
Total		130.498.900	131.495.800

Sumber : Olah data

Berikut ini adalah hasil realisasi biaya yang telah di lakukan, ini memiliki nilai yang sangatlah rendah, dibandingkan dari hasil perencanaan biaya yang di perlukan itu sangatlah besar. Dari hasil Olah data maka diketahui bahwa biaya –biaya untuk pembuatan KTP tahun 2022 totalnya adalah Rp. 130.498.900,- dan untuk tahun 2023 sejumlah Rp131.495.800,-

Adapun untuk biaya bahan baku per KTP Rp. 700,- untuk mesin KTP karena penulis mengambil data pada Disdukcapil tahun 2024 dan data yang diberikan tahun 2022 dan 2023, untuk biaya mesin pembuatan KTP penulis tempatkan ditahun 2022, untuk tenaga kerja yang bekerja ada 2 tenaga kerja dengan gaji per orang Rp 2.785.200 Per bulan untuk 1 Tahun dan ada pengeluaran untuk biaya tak terduga sejumlah Rp.5.000.000,-

Dalam Pembahasan *Value for money* penulis mengkhususkan pada perhitungan Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas (3E) dengan menerapkan sesuai Rumus dan perhitungan standard kinerja. Adapun data pendukung yang digunakan adalah data yang didapatkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga ada data yang diolah dari penulis.

1. Ekonomi

Secara Ekonomi dari data yang terdapat pada tabel- tabel diatas pengkonversian input primer yang berupa sumber daya keuangan menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasional konsep ekonomi terkait dengan konsep biaya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi} = \text{input rencana}/\text{Input Realisasi} \times 100\%$$

$$\text{Ekonomi tahun 2022} = 130.498.900/186.868.700 \times 100\% = 70\%$$

$$\text{Ekonomi tahun 2023} = 131.498.900/189.875.100 \times 100\% = 69\%$$

2. Efisiensi

Suatu organisasi memiliki program, kegiatan dapat dikatakan efisiensi apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya. (spending well)

Secara Efisiensi maka data dari tabel- tabel tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \text{Output}/\text{Input} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi tahun 2022} = 129,395 / 130.498.900 = 0,09\%$$

$$\text{Efisiensi tahun 2023} = 132,962/131.495.800 = 0,10\%$$

3. Efektivitas

Efektivitas berkaitan pada hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya yang harus dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan semakin besar sehingga kontribusi output terhadap pencapaian tujuan akan semakin efektif. Secara efektivitas maka data dari tabel- tabel tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \text{Nilai kinerja Outcome}/\text{Nilai kinerja output} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2022} = 129.395 / 186.868.700 \times 100\% = 0,07\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2023} = 132.969 / 189.875.100 \times 100\% = 0,07\%$$

Tabel 3.5 Program kerja Pembuuatan KTP pada Disdukcapil Kota Sorong

Kriteria kinerja 3E	Nilai Kinerja		Keterangan	
	2022	2023	2022	2023
Ekonomi	70%	69%	Kurang Ekonomis	Kurang Ekonomis
Efisiensi	0,09%	0,10%	Tidak Efisien	Tidak Efisien
Efektivitas	0,07%	0,07%	Tidak Efektif	Tidak efektif

Sumber : Hasil olah data

Keterangan untuk nilai standard kinerja 3E terlampir di halaman lampiran.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Perhitungan secara ekonomi untuk program pembuatan KTP untuk tahun 2022 dan 2023, tidak ekonomis karena biaya-biaya yang dikeluarkan cukup besar sedangkan output yang dicapai tidak sesuai yang direncanakan
2. Perhitungan secara efisien dan efektif tidak memenuhi standard penilaian kerja karena presentasi capaian sangat kecil dan dianggap tidak efisien dan efektif karena outcome yang dicapai tidak sesuai program

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Athaya Zhafirah.(2022).*Analisis value for money pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Sosila provinsi riau.Universitas Islam Riau pekan baru.*
- [2] Athaya Zhafirah.(2022).*Analisis value for money pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Sosila provinsi riau.Universitas Islam Riau pekan baru.*
- [3] Dominic Naomi Jovanka. (2023). *Analisis Value For Monay Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.* Universitas Kristen Duta Wacana.
- [4] Hafidotul Nur Hanifah. (2019). *Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintahan Kota Medan.*
- [5] Huswatul liana.(2021).*Analisis Value For Money Pada Kinerja keuangan dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usah Mikro.Kota Tanjung Pinang. Universitas Islam Riau pekan baru.*
- [6] Huswatul liana.(2021).*Analisis Value For Money Pada Kinerja keuangan dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usah Mikro.Kota Tanjung Pinang. Universitas Islam Riau pekan baru.*
- [7] Johan Arifin.(2017).*Akuntansu Sektor Publik.*Yogyakarta.Unit Penerbit Universitas Islam Indonesia.
- [8] Johan Arifin.(2017).*Akuntansu Sektor Publik.*Yogyakarta.Unit Penerbit Universitas Islam Indonesia.
- [9] Mahmudi. (2005). *Manajemen Sektor Publik.* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan

SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN.

- [10] Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit ANDI.
- [11] Sarsiti.(2020). *Akuntasnu Sektor Publik*.Cirebon.Unit Penerbit CV.Green Publisher Indonesia.
- [12] Sarsiti.(2020). *Akuntasnu Sektor Publik*.Cirebon.Unit Penerbit CV.Green Publisher Indonesia.
- [13] Tomi Hardiansyah.(2024). *Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman*. Universitas Cendekia Mitra.